

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

A.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan, atau yang biasa disebut sebagai empowerment, adalah peningkatan kemampuan yang sebenarnya telah dimiliki individu. Proses ini mengubah status dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga individu lebih bertanggung jawab. Empowerment berasal dari kata "power", yang berarti "control, authority, dominion". Awalan "emp" berarti "on put to" atau "to cover with", dengan demikian "more power". Jadi, empowering artinya "memberikan otoritas dan tanggung jawab yang lebih besar", yang berarti individu menjadi lebih berdaya dari sebelumnya dalam hal wewenang dan tanggung jawab, termasuk kemampuan individual yang dimilikinya (Sedarmayanti 2008:285).

Pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang mengandung arti "kekuatan". Dapat dijelaskan dalam suatu definisi yaitu memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum memiliki daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau tidak memiliki kekuasaan, tetapi

berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri, perlu mendukung pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program atau kegiatan pemberdayaan.

Pemberdayaan yang memiliki makna kekuatan. Dalam istilahnya merupakan terjemahan dari "empowerment" dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehari-hari seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan kekuatan kepada orang yang kurang mampu atau miskin, namun berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri, perlu mendukung pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan berpartisipasi dalam setiap program atau kegiatan pemberdayaan.

Usman (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan (empowerment) merupakan "upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat". Dalam konteks ini, pemberdayaan secara implisit mencakup unsur "partisipasi" yang seharusnya muncul dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan memberikan dorongan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan

keterampilan, dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengambil peran aktif dalam membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Dengan kata lain, pemberdayaan berusaha untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak lain, baik itu pemerintah, LSM, atau lembaga lainnya, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemberdayaan sangatlah vital. Peningkatan partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang kuat bagi pencapaian tujuan pemberdayaan. Sehingga, membangun pemahaman yang mendalam tentang konsep pemberdayaan dan pentingnya partisipasi aktif dalam mewujudkannya adalah suatu hal yang sangat esensial.

Robert Chambers (Alfitri, 2011: 22), seorang pakar dalam upaya pemberdayaan masyarakat, mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yang berpusat pada manusia (people centered), partisipatif (participatory), memberdayakan (empowering), dan berkelanjutan (sustainable). Konsep ini lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk

mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu.

Sumodiningrat (1999, h.133-134) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni: (1) Menciptakan iklim yang mendukung perkembangan potensi masyarakat (Enabling); (2) Memperkuat potensi dan kekuatan yang dimiliki masyarakat (Empowering); (3) Memberikan perlindungan (Protecting). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mencapai kemandirian dan membebaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.

Dalam diskursus pembangunan, konsep pemberdayaan sering kali dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo dalam Nugroho (2007, h.28), partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu utama dalam pembangunan saat ini.

Selain pentingnya konsep pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis. Menurut Prasajo

(2004, h.11), permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat, dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya. Salah satu tantangan utama adalah kebingungan tentang makna pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Tanpa pemahaman yang jelas, implementasi program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi tidak konsisten dan kurang efektif. Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah ketidakjelasan mengenai batasan masyarakat yang mampu melaksanakan pemberdayaan. Ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan sasaran dan strategi yang tepat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Adapun, dalam konteks ini, penting untuk memahami dengan jelas peran masing-masing pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Ketiadaan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme pencapaiannya juga merupakan tantangan lain yang dapat menghambat keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan adanya pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan dengan tepat dan efektif agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada esensinya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada kelompok, sebagai bagian

dari realisasi eksistensi manusia. Dalam konteks ini, manusia atau masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara personal, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai realisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, penting untuk memahami hakikat manusia yang akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat.

Menurut Suharto (2010: 58), pemberdayaan merujuk pada kemampuan individu, terutama kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), bukan hanya bebas dalam menyatakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan penyakit.
- 2) Mengakses sumber daya produktif yang memungkinkan masyarakat meningkatkan pendapatan dan mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari berbagai penjelasan dan pandangan yang disampaikan dalam paragraf-paragraf di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Konsep ini mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola dan mengontrol proses pemberdayaan, dengan memberikan akses kepada sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk meningkatkan mutu hidup mereka. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan menjadi landasan utama dalam perancangan dan implementasi program pemberdayaan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaannya, termasuk ketidakjelasan konsep, pembatasan masyarakat yang berhasil diberdayakan, serta peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pemberdayaan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terlibat aktif dalam memahami esensi dan konsep pemberdayaan serta berperan dalam mengimplementasikannya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yakni kemandirian, kebebasan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

A.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan dan mengalami ketidakberdayaan, baik itu karena faktor internal seperti

persepsi diri mereka sendiri, maupun karena faktor eksternal seperti penindasan dari struktur sosial yang tidak adil (Soerjono Soekanto 1987:75). Meningkatkan kekuatan masyarakat melibatkan pemberian akses kepada sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk meningkatkan mutu hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terlibat aktif dalam memahami esensi dan konsep pemberdayaan serta berperan dalam mengimplementasikannya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yakni kemandirian, kebebasan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan sebagai bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara personal, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai realisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep pemberdayaan dan pentingnya partisipasi aktif dalam mewujudkannya merupakan hal yang sangat esensial. Partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan, serta strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu utama dalam pembangunan saat ini (Craig dan Mayo dalam Nugroho 2007:28).

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memahami hakikat manusia yang akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program

pemberdayaan kepada masyarakat. Diperlukan adanya pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan dengan tepat dan efektif agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemberdayaan sangatlah vital. Peningkatan partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang kuat bagi pencapaian tujuan pemberdayaan. Sehingga, membangun pemahaman yang mendalam tentang konsep pemberdayaan dan pentingnya partisipasi aktif dalam mewujudkannya adalah suatu hal yang sangat esensial.

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan sebuah lingkungan di mana masyarakat memiliki kemampuan dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup secara merata. Pemberdayaan masyarakat mencakup upaya-upaya yang bertujuan untuk memperluas cakrawala pilihan bagi masyarakat, memungkinkan mereka untuk memiliki pandangan yang lebih luas dan membuat keputusan yang lebih baik untuk kepentingan mereka sendiri. Ini berarti bahwa melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka, serta kemampuan untuk secara aktif memilih jalan yang paling bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya tentang memberikan

kekuatan kepada individu atau kelompok, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan kolektif dan kemandirian yang berkelanjutan. (Agus Ahmad Syafi'i 2001: 70)

Kegiatan swadaya merupakan tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong peningkatan mutu hidup masyarakat demi memperoleh kesejahteraan yang diharapkan. (Fauzi, 2012).

Menurut Mardikanto dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019), tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. Perbaikan Kelembagaan (better institution)

Kegiatan perbaikan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan pengembangan jaringan kemitraan usaha.

b. Perbaikan Usaha (better business)

Dengan melakukan perbaikan sistem pendidikan, peningkatan aksesibilitas, dan kegiatan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis yang dilakukan.

c. Perbaikan Pendapatan (better income)

Perbaikan dalam bisnis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan dari setiap individu dalam masyarakat.

d. Perbaiki Lingkungan (better environment)

Dengan peningkatan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan secara fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan sering terjadi akibat kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaiki Kehidupan (better living)

Dengan adanya pendapatan dan lingkungan yang baik, maka akan meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari aspek kesehatan, Pendidikan, dan daya beli.

f. Peningkatan Masyarakat (better community)

Dengan kehidupan yang lebih baik dari segi sosial maupun fisik, diharapkan akan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sulistiyani (2017) sebagaimana yang dikutip oleh Iin Sarinah (2019), pemberdayaan dilakukan dengan tujuan membentuk jiwa kemandirian individu atau masyarakat. Kemandirian tersebut meliputi kemampuan berpikir mandiri, bertindak, dan mengelola tindakan mereka. Kemandirian masyarakat dapat dikenali dengan kondisi di mana mereka, saat dihadapkan pada suatu masalah, telah memiliki pemahaman atau pengetahuan dalam menemukan cara atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan kemampuan yang dimilikinya, masyarakat yang telah mandiri akan bertindak dengan hati-hati dan lebih teliti dalam mempertimbangkan, memutuskan, dan bertindak sesuai dengan pertimbangan yang telah

dibuat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan internal masyarakat tersebut.

A.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2012) menyatakan bahwa “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Oleh karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam (Heriyati & C.Kurniatun, 2019).

Menurut Sunit Agus Tri Cahyono (2008) yang dikutip oleh Heriyati & C. Kurniatun (2019), prinsip-prinsip pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal.
- b. Lebih mengutamakan tindakan sosial.
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau masyarakat lokal.
- d. Terdapat kesetaraan dalam hubungan kerja.
- e. Menggunakan pendekatan partisipatif, di mana anggota kelompok menjadi subjek, bukan objek.
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk mencapai keadilan.

Prinsip pemberdayaan masyarakat berakar pada kebutuhan dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, didasarkan pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dan harus mampu mendorong partisipasi masyarakat agar lebih memiliki kekuasaan atau daya.

Empat prinsip yang menjadi landasan untuk memastikan kesuksesan program pemberdayaan adalah kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan (Sri Najiati 2005: 54). Berikut penjelasan rinci mengenai empat prinsip tersebut :

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kesetaraan antara masyarakat dan lembaga yang mengelola program-program pemberdayaan, tanpa memandang jenis kelamin. Pada intinya, upaya ini membangun hubungan yang seimbang dengan memperkaya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan bersama. Setiap pihak saling mengakui keunggulan dan kelemahan mereka sendiri, menciptakan dinamika saling belajar yang berkelanjutan. Menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan sama terhadap semua individu atau kelompok dalam masyarakat.

2) Prinsip partisipasi

Program pemberdayaan yang memberikan kemerdekaan kepada daerah umumnya mengadopsi pendekatan partisipatif, yang memungkinkan daerah untuk mengatur, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program mereka sendiri. Namun, untuk mencapai

tingkat tersebut, diperlukan investasi dan interaksi dalam bentuk bimbingan yang melibatkan fasilitator yang sangat berdedikasi dalam memperkuat wilayah lokal. Partisipasi dalam konteks ini memacu semua pihak yang terlibat dalam program untuk berperan aktif mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

3) Prinsip Keswadayaan atau kemandirian

Pedoman ini mengutamakan penilaian dan penyesuaian berdasarkan kapasitas daerah lokal, daripada bergantung pada bantuan dari luar. Konsep ini mengubah pandangan terhadap masyarakat dari objek yang membutuhkan bantuan menjadi subjek yang memiliki kapasitas. Prinsip keswadayaan menggarisbawahi pentingnya memulai proses pemberdayaan dari sumber daya yang sudah ada dalam masyarakat. Hal ini mendorong promosi kemampuan masyarakat untuk mengontrol dan mengelola proses pemberdayaan mereka sendiri.

4) Prinsip Keberkelanjutan

Program pemberdayaan harus disusun dengan visi jangka panjang, meskipun pada awalnya pendampingan masyarakat oleh fasilitator mungkin lebih dominan. Namun, seiring berjalannya waktu, peran fasilitator akan berkurang secara bertahap, bahkan mungkin dihapus sepenuhnya ketika masyarakat telah mampu mengelola kegiatan mereka sendiri. Prinsip berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga efektivitas program dalam jangka panjang dengan

memastikan bahwa perubahan yang dicapai berlangsung terus menerus dan memberikan dampak positif yang berkesinambungan bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara menyeluruh, program pemberdayaan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang dilayani. (Sri Najiati, 2005)

A.4 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang penting dalam pengembangan komunitas yang berkelanjutan dan berdaya. Konsep ini melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi. Salah satu tahapan yang dipakai sebagai panduan untuk mengatur proses ini adalah model tujuh tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Isbandi Rukminto Adi (2013: 179). Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahap persiapan (Engagement), tahap pengkajian (Assessment), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (Designing), tahap pemformulasian rencana aksi (Formulation), tahap pelaksanaan program atau kegiatan (Implementation), tahap evaluasi (Evaluation), dan tahap terminasi (Disengagement). Berikut adalah penjelasan tentang tujuh tahapan tersebut:

1. Tahap Persiapan: Pada tahap ini terdapat dua langkah yang harus dikerjakan. Pertama, penyimpanan tenaga pemberdayaan

masyarakat yang dapat dilakukan oleh community worker. Kedua, persiapan lapangan yang umumnya diupayakan secara non-direktif (Adi, 2005).

2. Tahap Pengkajian (Assessment): Pada tahap ini, pengkajian dapat dilakukan secara individu atau melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Petugas harus mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki oleh klien.
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan: Pegiat menjadi agen perubahan yang memiliki peran untuk berkontribusi dalam mendorong warga berpartisipasi agar dapat membantu pada perumusan masalah serta solusi. Masyarakat diharapkan dapat menghasilkan alternatif program dan kegiatan.
4. Tahap Pemformalisasian Rencana Aksi: Pada tahap ini, agen perubahan membantu kelompok merumuskan program dan kegiatan serta membantu dalam pembuatan proposal jika diperlukan.
5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program Kegiatan: Peran kader masyarakat penting dalam menjaga kelangsungan program. Kerjasama antara petugas dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam tahap ini.
6. Tahap Evaluasi: Evaluasi melibatkan partisipasi warga dan petugas untuk memantau program. Dalam jangka pendek, warga membentuk sistem komunitas untuk pengawasan internal,

sementara dalam jangka panjang, komunikasi masyarakat ditingkatkan menggunakan sumber daya yang ada.

7. Tahap Terminasi: Tahap ini mencakup pemutusan hubungan formal dengan komunitas sasaran. Tujuannya adalah agar proyek dapat diakhiri dengan baik (Safei, A. A., Ono, A., & Nurhayati E., 2020).

B. Pemberdayaan Ekonomi

B.1 Pengertian Ekonomi

Secara umum, ekonomi merujuk pada kajian tentang bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Ini melibatkan analisis perilaku manusia dalam tiga aspek utama: konsumsi, produksi, dan distribusi.

Menurut para ahli, kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "oikos" yang berarti rumah, dan "nomos" yang berarti aturan. Oleh karena itu, ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian aturan yang mengatur pengelolaan kebutuhan hidup manusia, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup negara. Dengan menggunakan aturan ini, masyarakat mengatur cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa yang tersedia dalam jumlah terbatas. Ini melibatkan aktivitas individu dan masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang langka. (Asep Usman Ismail, 2008: 222)

Dalam karyanya yang berjudul "Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam", Paul A. Samuelson

memberikan definisi ekonomi sebagai bidang studi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks penggunaan sumber daya produktif yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk konsumsi.

Menurut Asep Usman Ismail, ekonomi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan, termasuk dalam aspek konsumsi, produksi, dan distribusi.

Menurut J. M Keynes, dalam "Ilmu Sosial Dasar", ekonomi adalah ilmu yang memberikan kontribusi penting dalam mengatasi masalah-masalah sehari-hari dalam masyarakat, seperti kemiskinan, pendapatan, produksi, konsumsi, dan distribusi. Keynes menekankan bahwa masyarakat ekonomi sering mengalami kegagalan dalam memberikan kesempatan kerja penuh dan dalam mendistribusikan pendapatan serta kekayaan secara merata.

B.2 Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melibatkan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, distribusi, dan pemasaran, serta upaya untuk memastikan masyarakat menerima gaji atau upah yang memadai. Selain itu, pemberdayaan juga mencakup penguatan masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Proses ini harus dilakukan secara holistik, melibatkan berbagai aspek dari masyarakat itu sendiri dan kebijakannya. (Hutomo, 2000).

Menurut Hutomo (2000), konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program atau proyek dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) bantuan modal; (2) pembangunan prasarana; (3) pendampingan; (4) penguatan kelembagaan; dan (5) penguatan kemitraan usaha.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Munandar, pemberdayaan ekonomi dapat didefinisikan sebagai rangkaian inisiatif atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan hidup dan memberikan akses terhadap modal bagi sekelompok orang tertentu. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh melalui pengembangan usaha dan upaya yang berkelanjutan.

Menurut Kartasmita (1996) dalam karyanya, pemberdayaan ekonomi diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan potensi ekonomi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup individu maupun kelompok. Pemberdayaan ekonomi juga diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat guna meningkatkan produktivitas, sehingga sumber daya manusia dan alam di sekitar dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Menurut Yatmo Mardi (2010), pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, dan menginspirasi masyarakat untuk menyadari dan menggunakan potensi yang dimilikinya. Tujuan

dari upaya tersebut adalah mempercepat perubahan struktur ekonomi dari tingkat masyarakat paling bawah hingga pada tingkat nasional. Perubahan ini meliputi transisi dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern dan dari ekonomi yang lemah menjadi ekonomi yang kuat.

Pemberdayaan ekonomi melibatkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memperoleh gaji atau upah yang memadai, serta akses terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Langkah-langkah ini harus dilakukan dengan berbagai cara, yang semuanya dipandang dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Ini termasuk meningkatkan kepemilikan masyarakat atas faktor-faktor produksi, mengontrol distribusi dan pemasaran, serta aspek politiknya. Pemberdayaan ekonomi juga mencakup penguatan pemilikan faktor produksi, penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan, yang dilakukan secara menyeluruh, baik dari perspektif masyarakat itu sendiri maupun dari perspektif kebijakan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup berbagai upaya untuk memperkuat kepemilikan faktor-faktor produksi, mengendalikan distribusi dan pemasaran, memastikan upah yang layak bagi masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ini harus menyeluruh, melibatkan baik masyarakat itu sendiri maupun kebijakan yang mendukungnya.

Menurut Hutomo (2000), konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup program-program seperti bantuan modal, pembangunan infrastruktur, pendampingan, penguatan lembaga, dan kemitraan usaha. Konsep ini kemudian menjadi landasan analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan interpretatif. Selain itu, prinsip jangka panjang juga penting ditekankan, di mana program pemberdayaan perlu dirancang secara matang agar memiliki dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Penguatan wilayah lokal adalah sebuah pekerjaan untuk mengatur wilayah lokal di samping gerakan untuk memperkuat fondasi wilayah lokal sehingga mereka dapat memahami kemajuan, kebebasan, dan keberhasilan dalam iklim hak-hak sipil yang dapat dipertahankan (Sumaryadi, 2005).

Penguatan dalam penguasaan distribusi dan pemasaran, peningkatan upah yang layak bagi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan, merupakan upaya yang harus dilakukan dalam ranah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi melibatkan serangkaian tindakan yang menjangkau berbagai aspek, baik dari internal masyarakat itu sendiri maupun dari kebijakan yang diterapkan. Pemberdayaan dalam ranah ekonomi bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dengan cara memotivasi dan menyadarkan akan potensi ekonomi yang dimilikinya, serta mengembangkannya lebih lanjut. Dalam konteks

yang lebih sederhana, ekonomi rakyat sering kali menjadi strategi "bertahan hidup" yang digunakan oleh masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Istilah "strategi bertahan hidup" di sini mengacu pada berbagai cara yang ditempuh oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan minuman. Karena kebutuhan tersebut menjadi prioritas bagi setiap individu, banyak yang bersedia melakukan apa saja untuk memastikan kecukupannya. Oleh karena itu, pemberdayaan dianggap sebagai solusi yang paling efektif untuk mengatasi ketidakstabilan tersebut salah satunya dalam mengurangi masalah kemiskinan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi melibatkan serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan inisiatif yang mencakup pemberian akses terhadap modal, peningkatan keterampilan hidup, pembangunan infrastruktur, pendampingan, penguatan lembaga, dan kemitraan usaha. Pendekatan pemberdayaan ekonomi juga memperhatikan prinsip jangka panjang untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Di samping itu, pemberdayaan ekonomi juga melibatkan upaya dalam memperkuat wilayah lokal, mengatur distribusi dan pemasaran, meningkatkan upah

yang layak, serta meningkatkan akses terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B.3 Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Dalam memajukan masyarakat tentunya pemberdayaan memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat yang sudah berdaya akan mudah berkembang dalam berbagai aspeknya termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karenanya, pemberdayaan harus dilaksanakan secara bertahap dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dalam praktek dan hasil dari pemberdayaan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam menempuh seluruh capaian dan keberhasilan dari pemberdayaan dengan baik, maka perlu adanya strategi yang dilibatkan agar capaian atau hasil yang diinginkan dari pemberdayaan tersebut dapat berhasil dengan baik dan maksimal.

Strategi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah ilmu dan seni memanfaatkan segala sumber daya untuk menerapkan kebijakan tertentu, baik dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, istilah "strategi" mengacu pada rencana tindakan yang menguraikan bagaimana sumber daya dan tindakan lainnya akan dialokasikan untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Pilihan untuk bertindak dengan cara yang berbeda dari pesaing adalah inti dari strategi. Muljono (2012)

Menurut Mardikanto & Soebianto (2012), strategi biasanya didefinisikan sebagai tindakan atau langkah-langkah khusus yang diambil untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu. Akibatnya, definisi strategi biasanya digabungkan dengan kata "metode", "teknik", atau "taktik". Menurut Mardikanto & Soebianto (2012), strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya terdiri dari tiga arah:

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Menjaga otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran dan masyarakat.
- c. Modernisasi melalui penerapan partisipasi masyarakat dalam perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk kesehatan), budaya, dan politik.

Demikian terbentuknya suatu strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Membangun alat untuk mengumpulkan data. Informasi yang diperlukan untuk kegiatan ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya, referensi yang ada, dan temuan pengamatan-lapang.
- b. Meningkatkan pemahaman dan komitmen untuk mendukung kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat.

- c. Membangun sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, pengawasan, dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat.

Parson dalam Suharto (2014) menyatakan bahwa proses pemberdayaan biasanya dilakukan secara kolektif. Namun, ada kemungkinan bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual dalam beberapa situasi. Namun, dalam hal ini, strategi ini tetap berhubungan dengan kolektivitas, karena mengaitkan masyarakat sasaran atau klien dengan sumber atau sistem lain selain dirinya sendiri.

B.4 Indikator Pemberdayaan Ekonomi

Usman (2004) membahas pendapatnya tentang komponen penting keberhasilan program pemberdayaan pemerintah dan swasta. Dia menyatakan bahwa lima indikator utama yang harus diperhatikan:

- 1) Penyediaan modal usaha merupakan langkah awal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan dana untuk membantu masyarakat memulai usaha mereka, diberikan dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk bibit dan benih.
- 2) Pembangunan infrastruktur merupakan faktor pendukung yang krusial dalam pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung macam-macam kegiatan sosial juga ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat.

- 3) Ketersediaan sarana yang memfasilitasi pemasaran barang dan jasa sangat penting. Fasilitas ini membantu dalam memperlancar proses pemasaran hasil produksi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
- 4) Pelatihan sosial bagi masyarakat dalam bidang ekonomi merupakan langkah yang esensial dalam memajukan program pemberdayaan. Pelatihan tersebut berfungsi untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas dan keragaman produk mereka, sehingga dapat bersaing di pasar.
- 5) Penguatan struktur kelembagaan merupakan hal yang tak kalah penting. Hal ini mencakup pembentukan manajemen internal yang efektif, pembukuan yang baik, serta ketaatan terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada penyediaan modal dan infrastruktur, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan keterampilan, manajemen, dan kelembagaan dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Edi Suharto, keberhasilan pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari delapan indikator, yaitu:

- a. Kemampuan membeli barang kecil. kemampuan seseorang untuk membeli barang tanpa bantuan orang lain.
- b. Kemampuan membeli barang besar

- c. kemampuan seseorang untuk membeli barang sekunder atau tersier.
- d. Terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- f. Kesadaran hukum politik.
- g. Terlibat dalam kampanye dan protes yang berkaitan dengan masalah masyarakat.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, seperti kepemilikan rumah, tanah, dan aset produktif.

C. Program *Buruan* SAE

C.1 *Buruan* SAE

Pembentukan Program *Buruan* SAE didasari oleh fakta dan data terkait Kota Bandung yang memiliki ketergantungan tinggi pada pangan dari luar kota, di mana 96% pemasokan pangan diperoleh dari sumber luar. Mengingat sulitnya menambah luas lahan untuk produksi pangan, solusi yang diambil adalah melalui program urban farming. Yang bertujuan memanfaatkan lahan sempit maupun tidak terpakai menjadi bermanfaat untuk tempat produksi pangan. Daripadanya, dapat menjamin ketersediaan pangan secara stabil. *Buruan* SAE sendiri terbentuk dari adanya evolusi dari program yang telah berjalan sebelumnya, yakni Bandung Berkebun. Mulanya, Bandung Berkebun mengalami kendala dalam implementasinya karena kurangnya antusiasme masyarakat dan fokus yang terlalu sempit pada budi daya

tanaman sayuran. Dengan adanya pergantian kepemimpinan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung pada pertengahan tahun 2019, *Buruan* SAE kemudian dibentuk sebagai upaya untuk memperbaiki implementasi program sebelumnya. Program ini merupakan hasil skripsi atau tesis Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan tercetusnya solusi atas permasalahan pangan. Delapan sektor dikembangkan dalam program *Buruan* SAE dalam kegiatan yang meliputi pembibitan, sayur, buah, budi daya tanaman obat, peternakan ayam, peternakan ikan, pengomposan, serta pengelolaan hasil.

Tanggapan Pemerintah Kota Bandung terhadap masalah ketimpangan pangan merespons dengan pembentukan program inovatif bernama *Buruan* SAE suatu bentuk kegiatan pertanian pada perkotaan. Program ini dikembangkan dari konsep urban farming yang telah ada sebelumnya. Kata "*Buruan*" berasal dari Bahasa Sunda yang berarti halaman atau pekarangan, sementara "SAE" merupakan akronim dari Sehat, Alami, dan Ekonomis.

Meskipun istilah urban farming bukanlah hal baru dalam tata kelola pertanian perkotaan, melalui program ini praktik pertanian menjadi lebih terintegrasi. *Buruan* SAE mengintegrasikan berbagai aspek pertanian, termasuk peternakan, perikanan, tanaman obat keluarga, buah-buahan, dan pengelolaan sampah menjadi pupuk

organik. Beda halnya dengan urban farming yang berfokus hanya pada kegiatan berkebun.

Potensi besar yang dimiliki urban farming terdapat pada strategi untuk menjaga ketahanan pangan perkotaan dan mendorong praktik dan teknologi pertanian yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selaras dengan upaya untuk memperindah lingkungan pada perkotaan dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi.

Manfaat lainnya, urban farming juga berkontribusi dalam menciptakan ketersediaan pekerjaan melalui nilai ekonomi yang dihasilkan dari pertanian dan sektor lainnya demi kelangsungan program ini. Karenanya, menjadi perhatian yang perlu dilakukan peningkatan pada setiap kota di negara ini. Mengingat potensinya dapat mendukung kemandirian pangan kota yang berkelanjutan.

Tujuan dari konsep pertanian perkotaan terintegrasi Buruan SAE adalah untuk membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan. Setiap tahun, kelompok baru masuk ke program di setiap kelurahan sejak dimulai pada tahun 2020. Pada tahun 2022, ada 335 kelompok di 151 kelurahan. Kemandirian pangan adalah tujuan utamanya.

Dalam wawancara yang diadakan pada Maret 2023, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyatakan bahwa setidaknya setiap kelurahan di Kota

Bandung memiliki anggota kelompok buruan SAE. DKPP juga membentuk 50 kelompok baru buruan SAE pada tahun 2023.

Pemerintah Kota Bandung melalui DKPP memberikan stimulus kepada kelompok buruan SAE baru untuk membentuknya. Paket stimulus termasuk peralatan pertanian kota untuk mengelola kompos, media tanam, bibit, benih, ayam petelur, dan benih ikan lele. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung memberikan dana untuk paket ini. Selain itu, DKPP, yang memiliki pendamping dan penyuluh di setiap kecamatan Kota Bandung, akan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada kelompok baru. Program Buruan Sae adalah inisiatif pertanian di Kota Bandung yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui produksi yang ekonomis, alami, dan sehat. Program yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dengan membentuk Kelompok Berkebun (PokBun) dalam skala kecil. Fokus kegiatan program mencakup budi daya ikan, ternak, sayuran, buah, tanaman obat, pembibitan, dan pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga.

Kelompok Berkebun (PokBun) menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan Program *Buruan Sae* di Kota Bandung. Dibawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), masyarakat yang tergabung dalam PokBun berperan aktif dalam budi daya ikan, ternak, sayuran, buah, tanaman obat, serta kegiatan

pembibitan. Tujuan utama program ini adalah menciptakan produksi pangan mandiri yang sehat dengan penggunaan bahan organik untuk pupuk dan pengendalian hama, sambil memberikan dampak ekonomis baik untuk konsumsi sendiri maupun penjualan dalam skala mikro.

C.2 Undang-Undang Mengenai *Buruan* SAE

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan dalam pembentukan Program *Buruan* SAE termasuk ke dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah kota mengimplementasikan konsep ini melalui Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 520/E.086 – DISPANGTAN, yang mengatur pelaksanaan aktivitas Urban Farming terintegrasi (*Buruan* SAE, Sehat Alami Ekonomis). Program ini menjadi wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pangan, yang merupakan kewenangan daerah.

Tujuan utama dibentuknya Program *Buruan* SAE adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mau memproduksi kebutuhan pangan sendiri melalui budi daya urban farming di lingkungan sekitar. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pangan yang lebih terjaga, alami, serta mampu dikonsumsi sendiri atau dapat diperjualkan secara mikro. Implementasi Program *Buruan* SAE diharapkan dapat mencegah kelangkaan pangan serta menurunkan ketergantungan pangan kota pada daerah lain. Meskipun tujuan tersebut

telah berhasil direalisasikan dengan baik, yang dibuktikan dengan tingginya antusiasme masyarakat yang terlihat dari banyaknya permohonan pembentukan kelompok-kelompok, yang masih memiliki kekurangan dalam pengoptimalan pada penerapannya karena keterbatasan anggaran yang hanya mampu mengakomodasi sebagian kecil dari jumlah kelompok yang mengajukan permohonan.

